

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ihsan. 1969. *Hukum Perdata IB*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- Adrian Sutedi. 2017. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Ghansham Anand. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State (With a New Introduction by A. Javier Treviño)*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Hans Kelsen. 2008. *Pure Theory of Law [Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight]*. Clark: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Herlien Budiono. 2012. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- _____. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Malcolm Leder et al. 1996. *Frameworks Consumer Law*. London: Financial Times Pitman Publishing
- Mariam Darus Badruzaman et al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon (Ed.). 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

- _____. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1991. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Richars Eddy. 2010. *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris dan Minuta Akta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeven.
- The Liang Gie. 1982. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Supersukses.
- Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia.

Tesis

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum.

Jurnal

Aris Yulia. 2019. "Profesi di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila." *Jurnal Penelitian Hukum Law & Justice* Volume 4, Nomor 1.

Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2.

Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung. 2017. "Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* Volume 2 Nomor 2.

Pieter E. Latumeten. 2017. "Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep "Volmacht dan Lastgeving" Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-47, Nomor 1.

Syprianus Aristeus. 2016. "Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Globalization, Free Trade, Capital Investment, And One Door Integrated Services)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2):209-230.

Internet

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. *Potret Zaman Now Pengguna & Perilaku Internet Indonesia*. Tersedia dari: <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI23April2018.pdf>.

Elisabeth Adventa. 2017. *Indikator Memulai Bisnis Masih Rendah*. Tersedia dari: <http://nasional.kontan.co.id/news/indikator-memulai-bisnis-masih-rendah>.

Candra Fajri Ananda. 2017. *Doing Business di Indonesia*. Tersedia dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1254756/18/doing-business-di-indonesia-1509906883/>. [Diakses 9 Maret 2019]

World Bank. 2018. *Doing Business 2018*. Tersedia dari: <http://www.doingbusiness.org/~media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/idn.pdf>.

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014

Sumber Non- Hukum

Wawancara dengan Notaris MS, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 13.00 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris RT, pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 11.00 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris MM, pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.00 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris BT, pada tanggal 24 Juni 2021, pukul 16.00 WITA, di Kota Makassar.